

**RESISTENSI PEREMPUAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN
EMAS DI GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI**

***WOMEN'S RESISTANCE TO MINING ACTIVITIES
GOLD IN MOUNT TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI***

Tia Mariati^{1*}, Yayuk Yuliati², Keppi Sukesi³

^{1*}(Universitas Brawijaya) (tia.mariati55@gmail.com)

²(Universitas Brawijaya)

(Email: yayuk.yyl@gmail.com)

³(Universitas Brawijaya)

(Email: keppi_s@yahoo.com)

*Penulis korespondensi: tia.mariati55@gmail.com

ABSTRACT

Sumberagung Village is an area that has the potential of marine tourism and natural resources in the form of gold located on Mount Tumpang Pitu. Mining from 2015 to 2022 is under the subsidiary of PT Indo Multi Niaga, PT BSI. Research problems: resistance of the people of Sumberagung Village to the IUP of PT BSI and PT. DSI in the exploitation activities of Mount Tumpang Pitu. The purpose of the research looked at the resistance carried out by the people of Sumberagung Village related to efforts to revoke IUP PT. BSI and PT. DSI. Formulation of research problems 1) How will gold mining activities impact the people of Sumberagung Village? (2) How is the process of conflict between the community and the company (3) How is the resistance of women to the exploitation of gold mines in Gunung Tumpang Pitu? This research uses a descriptive qualitative approach using case study methods. Determination of informants using Snowball sampling. Data analysis uses the Milles and Huberman 2014 interactive model analysis component. Research results 1))Damage in various sectors: the environment, namely the loss of protected forests of Mount Tumpang Pitu, the loss of endemic animals and plants and water pollution containing cyanide, mud floods, the loss of katakana rivers, soil degradation. Economic sector: crop failure due to floods of mud that entered the farm, fishermen's catches began to decrease so that fishermen had to go far to sea to Bali and Jember to get maximum results. Social sector silence, community conflict with the government and companies 2) The emergence of conflicts began from the permission of PT Hakman Metalindo to conduct a review of the gold content starting from Jember to Banyuwangi for 1 year 3) reciprocity in the form of: Demonstrations, bicycles to Surabaya, istigosah action, heavy equipment blocking action, construction of a blocking post at the entrance of Pancer Village.

Keywords: *Resistance, , Exploitation of Environmental Damage*

ABSTRAK

Desa Sumberagung merupakan kawasan yang memiliki potensi wisata laut dan sumberdaya alam berupa emas yang terletak di Gunung Tumpang Pitu. Pertambangan mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 berada dibawah anak perusahaan PT Indo Multi Niaga yaitu PT BSI. Permasalahan penelitian : resistensi masyarakat Desa Sumberagung terhadap IUP PT BSI dan PT. DSI dalam kegiatan eksploitasi Gunung Tumpang Pitu. Tujuan Penelitian melihat resistensi yang dilakukan masyarakat Desa Sumberagung terkait usaha mencabut IUP PT. BSI dan PT.

DSI. Rumusan masalah penelitian 1) Bagaimana dampak kegiatan penambangan emas bagi masyarakat Desa Sumberagung? (2) Bagaimana proses munculnya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan (3) Bagaimana resistensi perempuan terhadap kegiatan eksplorasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Penentuan informan menggunakan *Snowball sampling*. Analisis data menggunakan komponen analisis Milles and Huberman 2014 model interaktif. Hasil penelitian 1) Kerusakan diberbagai sector: lingkungan yaitu hilangnya hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, hilangnya endemic hewan dan tumbuhan dan pencemaran air yang mengandung sianida, banjir lumpur, hilangnya sungai katakana, degradasi tanah. Sector ekonomi : gagal panen akibat banjir lumpur yang masuk kedalam pertanian, hasil tangkapan nelayan yang mulai berkurang sehingga nelayan harus jauh melaut sampai Bali dan Jember untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sektor sosial kebising, konflik masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan 2) Munculnya konflik dimulai dari diizinkan PT Hakman Metalindo untuk melakukan tinjauan kandungan emas mulai dari Jember sampai Banyuwangi selama 1 tahun 3) resistensi berupa : Demonstrasi, kayuh sepeda sampai Surabaya, aksi istigoras, aksi penghadangan alat berat, pembangunan posko penghadangan di pintu masuk Desa Pancer

Kata Kunci : Resistensi, , Eksploitasi Kerusakan lingkungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati (Triatmojo, 2018). Berdasarkan Undang- Undang No 11 tahun 1967 bahan galian tambang dibagi menjadi tiga golongan. Golongan A disebut bahan strategis berupa minyak bumi, uranium, plutonium. Golongan B disebut bahan vital berupa emas, perak, besi dan tembaga. Golongan C bahan tidak strategis dan tidak vital berupa garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat dan asbes (Presiden RI, 1967). Daerah yang memiliki potensi Sumber daya vital di Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi tepatnya berada di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten dengan penghasilan sumber daya alam yang paling unggul dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur (Murtaza, 2020). Potensi sumber daya alam berupa emas berada di Banyuwangi terletak di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi (Suryowati, 2020). Penelitian awal yang mengungkapkan kandungan mineral di Gunung Tumpang Pitu oleh PT Hakman Group dan GVM yang diberikan izin kuasa pertambangan (KP) seluas 62.586 hektar pada tahun 1996. Kuasa pertambangan PT Hakman meluas mulai dari Jember sampai Banyuwangi. PT Hakman dalam menjalankan kegiatan bekerja sama dengan GVN dan *Place Dome* yang merupakan perusahaan tambang emas yang berbasis di *Vancouver* dari Kanada (Hakim & Zuhro, 2016). *Place dome* menguasai 51% usaha dan mengontrol operasi kegiatan eksplorasi yang ada di Gunung Tumpang Pitu. Akhirnya pada tahun 2000 *Place Dome* akhirnya tidak meneruskan untuk melanjutkan investasi saham karena terjadi ketidakstabilan politik dan krisis keuangan di Asia sejak tahun 1997 (Murtaza, 2020).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak meneruskan izin KP dengan Hakman Group. Pada tanggal 16 Februari 2006 PT. Indo Multi Cipta (IMC) menerima izin kuasa pertambangan penyelidikan umum dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tanggal 23 Maret 2006 PT Indo Multi Niaga (IMN) dan diberikan waktu paling lama 1 tahun untuk melakukan eksplorasi kandungan bijih mineral yang ada di Gunung Tumpang Pitu. Pada tanggal 02 Juli 2012 direktur utama PT. IMN mengajukan surat kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 236/IMN/VII/12 perihal permohonan peralihan IUP eksplorasi dan operasi produksi dari PT.

IMN diberikan kepada anak perusahaan yaitu PT. BSI. Permohonan tersebut disetujui oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan dikeluarkannya surat Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. BSI. Pada tanggal 9 Oktober 2007 Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 005/758/492.040/2007 perihal peningkatan status kegiatan eksplorasi menjadi kegiatan eksploitasi tambang emas Gunung Tumpang Pitu (Akmal, 2016). Perubahan status status kuasa pertambangan eksploitasi kurang mendapatkan persetujuan baik masyarakat Desa Sumberagung, LSM, dan anggota dewan perwakilan daerah. Kegiatan penambangan eksploitasi dinilai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan dapat merusak habitat asli kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Berbagai perlawanan dari masyarakat guna untuk menolak dan mencabut IUP PT BSI mulai dari Demonstrasi, penutupan jalan akses masuk Gunung Tumpang Pitu, pemblokiran akses pemasangan PLN masuk ke Gunung Tumpang Pitu sampai aksi kayuh sepeda mencabut ijin ke Surabaya. Berdasarkan permasalahan dan pertimbangan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ Resistensi perempuan terhadap kegiatan penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi” adapun rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana dampak kegiatan penambangan terhadap masyarakat Desa Sumberagung?, Bagaimana proses munculnya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan?, Bagaimana resistensi masyarakat Desa Sumberagung terhadap kegiatan penambangan?, Bagaimana peran stakeholder dalam penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif menggunakan metode studi kasus. Subjek penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan kegiatan resistensi untuk mencabut IUP PT. BSI. Lokasi penelitian di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan tempat di Sumberagung dilakukan dengan sengaja karena: Desa Sumberagung memiliki potensi sumber daya alam berupa emas terbaik ke dua setelah Papua, status Gunung Tumpang Pitu yang berubah awalnya hutan lindung Tumpang Pitu yang dinaikan statusnya menjadi hutan produksi, terdapat konflik antara Perusahaan dengan masyarakat karena penolakan IUP dan kegiatan eksploitasi,. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Uji validitas data menggunakan triangulasi serta teknik analisis menggunakan Miles and Huberman 2014 berupa komponen analisis model kualitatif/ Model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak kegiatan penambangan terhadap masyarakat Desa Sumberagung

Kegiatan penambangan eksploitasi emas di Gunung Tumpang Pitu memberikan dampak positif juga negatif. Dampak positif kegiatan penambangan yaitu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. dan menyumbangkan devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa untuk konsumsi serta menyediakan prasarana bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya (Dewi, 2019). Adapun dampak positif dari kegiatan penambangan yaitu:

- Aspek ekonomi : Investasi pertumbuhan ekonomi dari peluang kerja yang terbuka dan mengurangi pengangguran sesuai data Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 3.92 persen dari seluruh angkatan kerja kondisi membaik dari tahun 2021. tingkat

pengangguran terbuka menurun mencapai 3,71 persen berada di bawah TPT Jawa Timur yang mencapai 4,16 persen, Meningkatkan pendapatan daerah : Pendapatan asli daerah Kabupaten banyuwangi meningkat dilangsir dari berita detik.com Pemkab Banyuwangi mendapatkan tambahan bagi hasil dari pembayaran pajak hingga mencapai 440 hingga 500 Miliar dari *Golden share*, Meningkatkan UMKM :

Tabel 1 Jumlah persebaran usaha masyarakat Desa Sumberagung

Nama Desa	Jenis Usaha		
	Pasar	Toko	Warung
Sarongan	1	74	1
Kandangan	0	128	9
Sumberagung	1	131	18
Pesanggaran	1	230	26
Sumbermulyo	0	67	8
Jumlah	3	630	62

(Sumber : BPS Kecamatan Pesanggaran 2021)

Berdasarkan tabel diatas persebaran usaha masyarakat Desa sumberagung mulai dari Desa Sarongan pasar sebanyak 1 buah dan terdapat toko sebanyak 74 dan warung sebanyak 1. Pada Desa Kandangan jumlah pasar 0 sedangkan toko berjumlah 128 dan warung berjumlah 9. Pada Desa Sumberagung pasar berjumlah 1 sedangkan toko berjumlah 131 dan warung 18. Pada Desa Pesanggaran pasar terdapat 1 sedangkan toko terdapat 230 dan warung berjumlah 26. Pada Desa Sumbermulyo pasar 0 terdapat toko 67 dan warung 8. Berdasarkan data diatas jumlah toko memiliki nilai paling banyak mencapai 630 kedua warung mencapai 62 dan pasar 3.

- Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia : PT.BSI juga memberikan kesempatan untuk putra putri daerah Desa Sumberagung untuk meneruskan pendidikan di tingkat SD,SMP, SMA dan juga tingkat lanjut.
- Banyak jumlah pendatang yang bekerja di tambang dan tersebar di 4 RT dan RW.

Tabel 2. Angka mutasi pendatang Desa Sumberagung

Nomor	Desa	Pendatang		Total
		Laki laki	Perempuan	
1.	Sarongan	12	20	32
2.	Kandangan	28	31	59
3.	Sumberagung	43	29	72
4.	Pesanggaran	154	74	228
5.	Sumbermulyo	51	41	92
	Jumlah	288	195	483

➤ (Sumber : BPS Kecamatan Pesanggaran dalam angka tahun 2020)

Tabel persebaran mutasi pendatang yang terbanyak di Desa Pesanggaran mencapai total 228 meliputi jumlah laki-laki 154 orang dan perempuan sebanyak 74 orang. Jika dibandingkan jumlah pendatang berdasarkan jenis kelamin maka paling banyak adalah laki-laki dengan nilai 288 orang sedangkan perempuan hanya 195 orang sehingga jumlah keseluruhan mutasi pendatang pada tahun 2020 baik laki-laki dan perempuan mencapai 483 orang.

Kegiatan penambangan selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa :

1. Kerusakan lingkungan hutan lindung

Peralihan status hutan lindung menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi Gunung Tumpang Pitu.



Gambar 1 Gunung Tumpang

Pitu dilihat dari Pantai

Pancer

Terlihat pada foto tersebut keadaan Gunung Tumpang pitu yang sudah gundul karena kegiatan eksploitasi secara berlebihan telah dilakukan oleh pemilik IUP sehingga merusak kawasan asli hutan lindung Gunung Tumpang Pitu.

2. Kerusakan akses jalan

Kegiatan pra-reproduksi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan awalnya menggunakan akses jalan darat sehingga mobil yang melintasi wilayah Desa Sumberagung melebihi tonase yang telah ditentukan menurut (Heri, 2022)



Gambar 2 Akses jalan Sumberagung & pemblokiran Pra-konstruksi tambang

Gambar diatas menunjukkan kerusakan jalan yang ada di Desa Sumberagung karena dilewati oleh kendaraan yang memiliki beban terlalu berlebihan. Sehingga menimbulkan kontra dan aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat Desa Sumberagung. Dibawah ini adalah aksi masyarakat Desa Sumberagung yang melakukan aksi demonstrasi penolakan kegiatan pra rekontruksi yang melintasi jalan utama dan membuat rusak jalan utama Desa Sumberagung. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan karena pihak PT BSI melanggar salah satu ketentuan syarat yang ada di Amdal jalan yang harus digunakan untuk kegiatan pra rekontruksi tidak sesuai dengan realitasnya. jika dilihat dari Amdal pra rekontruksi jalan utama Desa Sumberagung tidak layak untuk tonase mobil yang mengangkut bahan dan alat untuk pihak PT BSI sehingga masyarakat melakukan pemblokiran jalan untuk menutup akses distribusi alat menuju Gunung Tumpang Pitu. Pada tahun 2022 kompensasi perbaikan jalan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT BSI.



Gambar 3 Kompensasi perbaikan jalan Sumberagung

Dari gambar diatas bisa dilihat perbedaan akses jalan yang sudah diperbaiki merupakan salah satu kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dan merupakan salah satu tuntutan masyarakat kepada pihak perusahaan.

3. Hilangnya Sumber Mata air

Desa Sumberagung dari awal sejarahnya terkenal akan sumber air yang melimpah tetapi setelah adanya kegiatan penambangan masuk perubahan mulai terjadi karena penggunaan Gambar : Hilir sungai Ksumber mata air yang besar untuk proses pelepasan emas dan penambangan pohon menyebabkan sumber mata air menjadi hilang. Menurut salah satu warga masyarakat Desa Sumberagung (Heri, 2022)“ disini dulu tidak pernah kekeringan karena sumber mata air berasal dari sungai katakan tetapi setelah perusahaan masuk dan membuat tanggul di atas aliran sungai menjadi kering bisa dilihat di aliran menuju pantai Pulau merah “



Gambar 4 Hilir sungai katakan

Dapat dilihat dari kedua gambar diatas aliran sungai katakan semakin mengering, padahal aliran tersebut salah satu sungai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian tetapi debit air semakin berkurang maka masyarakat yang berprofesi sebagai petani harus mengantri air lebih lama dan jika mereka memiliki uang lebih maka akan membuat sungai bor untuk pengairan pertanian.

4. Banjir Lumpur karena tanggul perusahaan bocor

Penggunaan air untuk pelepasan emas membutuhkan jumlah air banyak sehingga menyebabkan pengeboran yang dalam untuk mendapatkan air yang diperlukan untuk produksi penambangan. tetapi hasil dari kegiatan pelepasan emas yang ditampung di tanggul-tanggul pada waktu hujan lebat mengalami kebocoran dan lumpur yang berada di tanggul terbawa sampai ke Pulau Merah dan Pulau Mustika.



Gambar 5 Banjir Lumpur di Pulau Merah & Mustika

Kejadian banjir lumpur yang terjadi di pulau merah dan pantai serta mengenai sektor pertanian di Desa sumberagung sehingga menyebabkan gagal panen dan tercemarnya pantai.

5. Peledakan

Kegiatan eksploitasi yang dilakukan perusahaan tidak hanya dilakukan secara manual dan menggunakan alat modern tetapi juga menggunakan peledak untuk menghancurkan sedimen tanah yang berbatu. dampak kegiatan tersebut kepada masyarakat banyak rumah yang rusak dan trauma. menurut bu Painsi selaku masyarakat Desa Sumberagung “ disini setiap jam 12 siang waktunya orang istirahat dari sawah akan terdengar dan terasa getaran akibat kegiatan pengeboman yang menyebabkan rumah di sekitar Pancer mengalami kerusakan dan masyarakat trauma.

Analisis dampak kegiatan Gunung Tumpang Pitu dari berbagai aspek

Nomor	Aspek	Keterangan
1.	Aspek ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Gagal panen karena terjadinya luapan lumpur
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik antar masyarakat dengan PT BSI dan Pemerintah • Kerugian secara waktu dan Materi untuk melakukan aksi Demonstrasi untuk mencabut ijin IUP PT BSI • Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pmerintahan
3.	Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan rutin pengajian Jumat Kliwon di depan Pemkad dan Masjid di Sumberagung
4.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak Banjir lumpur yang membawa kandungan Sianida

Proses munculnya konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sumberagung dengan pihak perusahaan.

Permasalahan tambang di Gunung Tumpang Pitu yang dilakukan oleh PT IMN bermula dari PT IMN masuk pada tahun 2005 dengan maksud melakukan kegiatan eksplorasi kandungan biji

emas. Izin kegiatan eksplorasi disetujui oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Menteri Kehutanan dengan SK No. 406/ MENHUT-VII/PW/2007. Perizinan kegiatan eksplorasi kandungan emas hanya dua tahun dimulai dari tahun 2007-2009. Selama kegiatan berlangsung status Amdal PT IMN berubah dari kegiatan eksplorasi menjadi kegiatan eksploitasi sesuai SK No. 005/758/429.0402/2007. Perubahan tersebut membuat masyarakat, LSM dan anggota dewan kurang setuju karena dinilai dapat merusak lingkungan dan habitat alamiah hutan lindung. Apalagi surat rekomendasi DPRD dimulai cacat di mata hukum karena tidak melalui sidang paripurna. Kontra terjadi antara masyarakat yang menolak izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Keadaan menjadi sangat rumit ketika muncul SK Bupati No.188/05/05/KP/429.012/2007 mengenai naiknya izin eksploitasi yang dirahasiakan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintahan dikarenakan memberikan izin secara sembunyi-sembunyi. Kronologi Konflik SDA di Gunung Tumpang Pitu Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Resistensi perempuan terhadap kegiatan eksploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu

Resistensi masyarakat Desa Sumberagung menuntut dicabutnya IUP PT. BSI dan PT DSI yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dibawah ini resistensi yang dilakukan masyarakat Desa Sumberagung dalam mencabut IUP PT BSI

Nomor	Resistensi yang dilakukan masyarakat
	Demonstrasi seribu warga mendatangi DPRD Banyuwangi mencabut IUP PT BSI
	Ribuan warga Kecamatan Pesanggaran melakukan demonstrasi di kantor PT BSI untuk meminta kegiatan di hentikan dan meninggalkan Gunung Tumpang Pitu.
	Ribuan aksi melakukan aksi kedua kali di kantor PT BSI sehingga menimbulkan keributan besar 1 orang perempuan ditangkap dianggap sebagai dalang dari otak demonstrasi.
	Tinjauan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait banjir lumpur dihadap oleh puluhan orang yang meminta mencabut IUP PT BSI.
	Masyarakat melakukan aksi di Depan Pemerintah Desa Sumberagung untuk meminta dicabut IUP PT. BSI
	Aksi selasa Kliwon oleh masyarakat yang menuntut pencabutan IUP PT BSI
	Pendirian tenda penolakan di perbatasan Desa Pancer
	Aksi kayuh sepeda mulai dari Banyuwangi-Surabaya menuntut dicabutnya IUP PT BSI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Resistensi yang dilakukan masyarakat Desa Sumberagung merupakan upaya untuk melindungi lingkungan dari kerusakan sehingga jika lingkungan rusak akibat kegiatan eksplorasi maka akan mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan baik sosial, ekonomi, lingkungan, spiritual da kesehatan.
2. Kegiatan penambangan yang ada di Gunung Tumpang Pitu memberikan dampak negatif dan positif.

3. Proses munculnya konflik mulai perizinan kuasa penambangan, kenaikan status hutan lindung menjadi hutan produksi, penyesuaian Undang-undang minerba yang digunakan untuk menjerat masyarakat yang menolak kegiatan penambangan.
4. Resistensi masyarakat untuk menolak dan mencabut IUP PT BSI dan PT DSI mulai dari aksi 1000 masa menolak di depan kantor DPRD Banyuwangi, demo pemasangan tiang listrik dan penanaman kabel tiang listrik, 4 warga yang dijadikan tersangka menyebarkan ajaran marxisme, pendirian tenda perjuangan, dan aksi kayuh sepeda dari Banyuwangi sampai ke Surabaya.

Saran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih cermat dalam mengawasi dan memberikan izin perusahaan dalam mengakuisisi suatu sumber daya alam
2. Perlu adanya kontrol antar pemerintah, dinas lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul. Seperti halnya kasus banjir lumpur dan perlu adanya sanksi yang tegas jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap Amdal agar dampak negatif bisa diminimalisir

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, P. (2016). *Kata Bupati Anas Soal Kronologi Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Baca artikel detiknews, "Kata Bupati Anas Soal Kronologi Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3173240/kata-bupati-anas-soal-kronol>*. 2. <https://news.detik.com/berita/d-3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi>
- Dewi, P. ariska. (2019). *Dinamika konflik masyarakat dengan penambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi*. 130.
- Hakim, R., & Zuhro, Z. (2016, November). *Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu dari Masa ke Masa (Bagian 3)*. 3. <https://www.mongabay.co.id/2016/11/11/tambang-emas-tumpang-pitu-dari-masa-ke-masa-bagian-3/>
- Heri, B. (2022). *Kerusakan jalan Desa Sumberagung*.
- Murtaza, S. (2020). *Repertoar gerakan penolakan eksploitasi Gunung Tumpang Pitu (Vol. 4, Issue 1)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Presiden RI. (1967). *Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.
- Suryowati, E. (2020). *Gunung emas di selatan Banyuwangi*. 2. <https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2020/melihat-tumpang-pitu-dari-dekat-gunung-emas-di-selatan-banyuwangi/>
- Triatmojo, B. dimas. (2018). Pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue September 2019).